

INDIKATOR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Harina Yuhety,* Yusufhadi Miarso, dan Anisah Baslemah**

Abstract

Considering the importance of lifelong education, this study aimed at obtaining the quality of lifelong education program in Indonesia. The study employed policy research method exploring the information from various sources. The findings of the study concluded that although the lifelong education program is not explicitly stated in the education acts, its existence is undeniable conceptually and empirically.

Keywords: lifelong education, indicator of program quality, life skill, lifelong learner.

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pendidikan telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pada Pasal 4 ayat (2) ditetapkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam ayat (3) ditetapkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya dalam ayat (6) ditetapkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Ketentuan ini mengandung arti pentingnya proses pendidikan daripada sekedar materi pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tentang sistem terbuka dan multimakna telah dimungkinkan pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Untuk keperluan itu diperlukan adanya informasi tentang kategori dan indikator mutu yang berlaku untuk program pendidikan semua jalur sebagai bagian dari program pendidikan sepanjang hayat.

Urgensi berkembangnya pendidikan dan belajar sepanjang hayat dilatarbelakangi oleh kondisi nyata (*real conditons*) bangsa-bangsa di dunia yang

dihadapkan pada kian banyaknya pengangguran, bertambahnya penduduk miskin, melemahnya standar kehidupan dalam populasi penduduk dunia yang makin bertambah, makin tajamnya jurang antara yang kaya dan yang miskin. Kondisi tersebut menjadi inspirasi kunci (*key inspiration*) bagi berkembangnya belajar sepanjang hayat melalui pengembangan potensi manusia (*the development of human potential*) (Longworth dan Davies, 1996:24).

Dalam pengkajian ini masalah dibatasi pada (1) Bagaimanakah rumusan indikator mutu program pendidikan sepanjang hayat? (2) Bagaimanakah pendapat pemangku kebijakan mengenai indikator mutu program pendidikan sepanjang hayat? (3) Konsensus apa saja yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan standar mutu program pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan satuan pendidikan nonformal? (4) Kategori dan Indikator apa saja yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan dalam standar program pendidikan sepanjang hayat?

Tujuan umum pengkajian ini adalah untuk memberikan masukan kebijakan kepada para pengambil keputusan kebijakan berupa indikator mutu program pendidikan sepanjang hayat berdasarkan persepsi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat diberlakukan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hasil kajian diharapkan dapat dijadikan masukan lebih lanjut bagi Unit Utama Manajemen Pendidikan dan Badan Standar Nasional Pendidikan untuk dijabarkan lebih lanjut sebagai peraturan turunan yang melengkapi perundangan yang ada.

* Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional

** Guru Besar Universitas Negeri Jakarta

KAJIAN TEORETIS

Hakikat Pendidikan Sepanjang Hayat

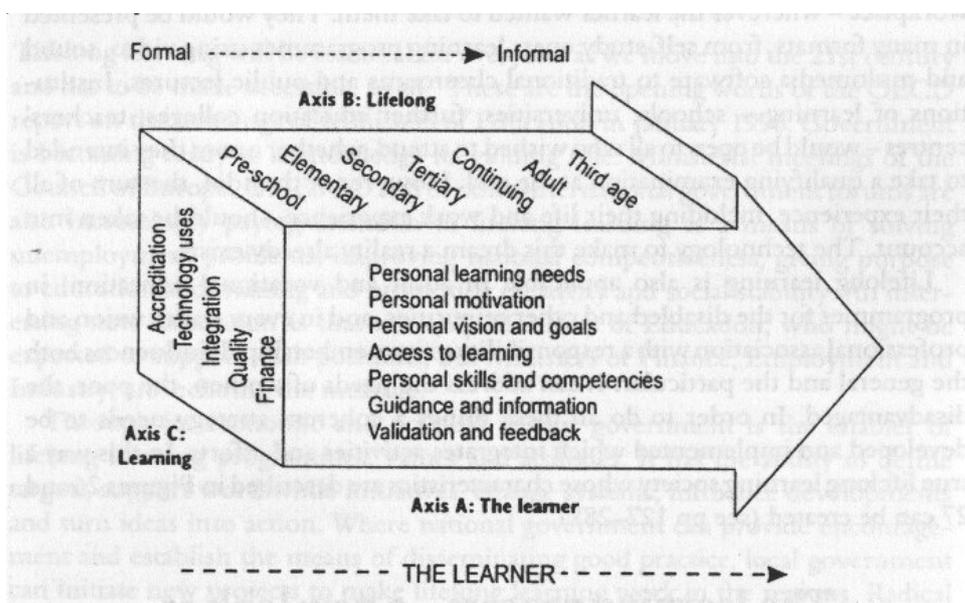
Pendidikan dan belajar sepanjang hayat didefinisikan sebagai pengembangan potensi manusia melalui proses yang mendukung secara terus menerus yang menstimulasi dan memberdayakan individu-individu agar memperoleh semua pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan, dan pemahaman. Semuanya itu akan diperoleh dalam keseluruhan hidup individu dan kemudian menerapkannya dengan penuh percaya diri, penuh kreativitas, dan menyenangkan dalam seluruh peran, iklim, dan lingkungan (Longworth dan Davies, 1996:22).

Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) merupakan suatu gagasan atau konsep, bahkan direkomendasikan sebagai suatu konsep induk dalam upaya inovasi pendidikan. Dengan kata lain PSH bukanlah merupakan suatu jalur ataupun satuan dan atau program (sebagaimana ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003), melainkan sebagai suatu ide yang menjadi landasan pengembangan jalur ataupun satuan pendidikan. Hal ini perlu ditegaskan bahwa UUSPN No. 20 tahun 2003 memberi arahan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Dilihat dari cakupannya, PSH menurut Gestrelus (1997), meliputi interaksi belajar-membelajarkan, penentuan bahan belajar, metode belajar, lembaga penyelenggara pendidikan, organisasi penyelenggara, fasilitas, administrasi, dan kondisi lingkungan pendukung kegiatan yang berkelanjutan. Oleh karena

itu, pendidikan sesungguhnya dapat berjalan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Salah satunya program pendidikan nonformal yang meliputi kegiatan belajar sebaya (*peer group*), upaya peningkatan taraf hidup keluarga, belajar di perpustakaan, belajar dalam lingkungan kerja, lapangan usaha, lembaga-lembaga penyelenggara program pendidikan maupun dalam semua kegiatan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.

Belajar sepanjang hayat merupakan proses kontinum dari elemen-elemen yang saling berkaitan (*interdependent*), yang dilandasi oleh kebutuhan individu dalam pendidikan sepanjang hidupnya. Longworth dan Davies (1996) melukiskan proses belajar sepanjang hayat yang merentang dari pendidikan formal, nonformal hingga informal. Aksis A – pemelajar - adalah nilai, keterampilan, dan atribut belajar sepanjang hayat yang akan membawa pemelajar ke arah kemajuan melalui siklus belajar sepanjang waktu sebagaimana ditunjukkan dalam Aksis B. Aksis B adalah sepanjang hayat - tingkat perbedaan perjalanan hidup semua pemelajar ditempuh melalui perolehan pengetahuan dan pemahaman, melalui sistem belajar formal hingga sistem belajar informal. Aksis C adalah belajar - merupakan seperangkat pendukung dari sistem belajar sepanjang hayat di mana pemelajar beradaptasi dengan kebutuhan belajarnya. Gambar di bawah ini menunjukkan proses belajar sepanjang hayat yang berlangsung secara kontinum.



Gambar 1. Proses belajar sepanjang hayat (Longworth dan Davies, 1996:20)

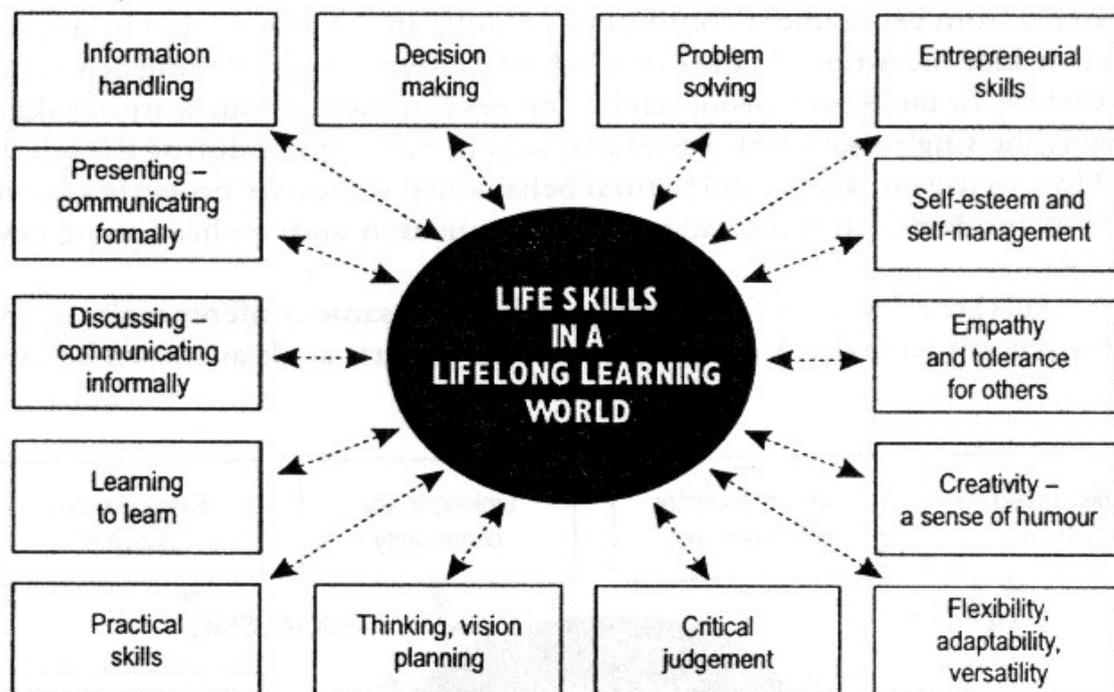
Proses belajar dalam lingkup pendidikan sepanjang hayat dapat ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya, seseorang yang ingin mempelajari teknik-teknik membuat barang kerajinan tangan, memasarkan hasil produksi, dan mengelola unit usaha maka mungkin ia dapat menempuh langkah-langkah berikut.

1. Menyaksikan atau mengamati orang lain melakukan kegiatan tertentu yang diinginkan.
2. Membantu orang lain yang membuat barang atau melakukan usaha.
3. Ikut serta bersama orang lain yang melakukan kegiatan.
4. Mengerjakan sendiri pekerjaan kegiatan tertentu (Sudjana, 2004).

Melalui salah satu atau beberapa langkah tersebut maka ia dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan atau aspirasinya untuk

mencapai kepuasan dalam peningkatan diri. Aspek tingkah laku inilah yang perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik karena perubahan aspek tingkah laku tersebut akan mempengaruhi peningkatan taraf hidup dan kehidupan peserta didik.

Proses belajar sepanjang hayat harus menempatkan nilai-nilai kecakapan hidup (*life skills*) sebagai muatan strategis yang terintegrasi dengan materi belajar sepanjang hayat. Nilai kecakapan hidup dan kecakapan sosial dalam dunia belajar sepanjang hayat akan sangat baik bila dikembangkan melalui sistem kemitraan (*partnership system*) dengan melibatkan orangtua, gubernur, organisasi profesi, kelompok minat, dan industri. Dalam gambar berikut terlihat ada sepuluh daftar kecakapan hidup paling atraktif bagi pengembangan wawasan dan nilai belajar sepanjang hayat.



Gambar 2. Kecakapan hidup dalam dunia belajar sepanjang hayat (Longworth, N & Davies, W.K., 1996).

Pentingnya belajar dari dan dalam dunia kehidupan nyata tidak terbatas pada upaya untuk memiliki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi saja. Lebih jauh dari itu kegiatan belajar mencakup segi-segi kehidupan yang lebih luas seperti nilai keagamaan, hubungan sosial, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Kegiatan belajar diperlukan pula untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus berkembang dalam kehidupan. Dengan perkataan lain kegiatan belajar sepanjang hayat adalah untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Indikator Mutu Pendidikan

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan perlunya ditentukan standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang mutu sistem pendidikan, yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang Sisdiknas. Tujuan standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Namun standar nasional pendidikan ini baru terbatas pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Secara konseptual mutu pendidikan diartikan secara beragam, tergantung pada situasi dan lingkungan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Donald M. Morrison, Kelly Mohaski, dan Katryn Kotter yang hasilnya divalidasikan oleh *the Center for Reseach on Educational Policy of University of Memphis* pada tahun 2005, menunjukkan adanya sejumlah indikator kualitas pembelajaran (*instructional quality indicators*) yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori, yaitu: (1) lingkungan fisik yang kaya dan merangsang, (2) iklim kelas yang kondusif untuk belajar, (3) harapan jelas dan tinggi para peserta didik, (4) pembelajaran yang koheren dan berfokus, (5) wacana ilmiah yang merangsang pikiran, (6) belajar otentik, (7) asesmen diagnostik belajar yang teratur, (8) membaca dan menulis sebagai kegiatan regular, (9) pemikiran matematis, serta (10) penggunaan teknologi secara efektif. Kesepuluh kategori tersebut dijabarkan lagi menjadi 42 indikator (Morrison, Mohaski, dan Cotter, 2005).

Sementara itu *the National Education Association* di Amerika Serikat merumuskan enam kunci untuk keunggulan (*keys to excellence*) yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 35 indikator kualitas satuan pendidikan (*indicators of a quality school*). Keenam kunci keunggulan tersebut adalah (1) pemahaman bersama dan komitmen terhadap tujuan yang tinggi, (2) komunikasi terbuka dan kolaborasi dalam memecahkan masalah, (3) penilaian belajar dan pembelajaran secara terus menerus, (4) belajar pribadi dan profesional, (5) sumber-sumber untuk menunjang belajar dan pembelajaran, serta (6) kurikulum dan pembelajaran (<http://www.nea.org/schoolquality/index.html>).

Menurut Hoy, *et al.* (2000), yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah suatu evaluasi atas proses mendidik yang dapat meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan dan membina bakat dari peserta didik, proses pendidikan itu sendiri, dan bersamaan dengan itu memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh mereka yang bertanggung jawab membiayai dan menerima lulusan pendidikan. Pendapat tersebut memperkuat pendapat bahwa ke tiga pihak yang berkepentingan perlu merumuskan kesepakatan bersama.

Konsep mutu pendidikan menurut Miarso (2004:561) mengandung lima rujukan, yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

Adapun yang merupakan ciri dari kesesuaian ini, antara lain adalah sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, prinsip, dan atau nilai baru dalam pendidikan.

Menurut pendapat Deming (Jenkins, 1996:12-13) pendidikan merupakan suatu sistem dengan tujuh komponen yang harus ada dan saling berkaitan. Ke tujuh komponen tersebut adalah (1) tujuan (*aims*); (2) pelanggan (*customers*); (3) persediaan (*supplies*); (4) masukan (*input*); (5) proses; (6) keluaran (*output*); dan (7) ukuran kualitas (*quality measurement*). Deming menyatakan bahwa tujuan umum pendidikan adalah meningkatkan hal-hal yang positif, mengurangi hal-hal yang negatif sehingga setiap peserta didik bergairah untuk belajar. Adapun yang dimaksudkan dengan pelanggan adalah para peserta didik terutama yang menjadi subjek dalam program wajib belajar, meskipun termasuk pula peserta didik lain seperti maha peserta didik dan warga belajar dewasa.

Konsep tentang mutu pendidikan dengan demikian juga diartikan secara berbeda beda, tergantung pada situasi, kondisi, dan sudut pandang. Pada awal kemerdekaan dahulu, adanya kesempatan satuan pendidikan bagi kebanyakan warga sudah dianggap sesuatu yang bermutu karena sebelumnya kesempatan itu tidak ada atau sangat terbatas. Sekarang ini, sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi, pendidikan atau pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan mengenal dan memanfaatkan teknologi informasi, dianggap kurang bermutu.

Perbedaan sudut pandang didasarkan pada pendapat bahwa dalam proses pendidikan ada tiga unsur yang berkepentingan. **Pertama** adalah pemerintah dan atau yayasan bagi pendidikan swasta yang menentukan aturan pengelolaan (termasuk anggaran dan tata laksana); **kedua** adalah peserta didik yang memperoleh manfaat dari pendidikan; dan **ketiga** adalah masyarakat, termasuk orangtua yang memperoleh manfaat dari tersedianya lulusan atau hasil dari proses pendidikan. Ketiga sudut pandang ini ada kemungkinan berbeda dalam mengartikan mutu proses pendidikan.

Mutu Program PSH

Mutu program PSH mengandung banyak rujukan. Beberapa di antara rujukan itu adalah bahwa program PSH yang bermutu harus memiliki kesesuaian dengan standar tertentu, kesesuaian dengan kebutuhan tertentu, kesepadanan dengan karakteristik dan kondisi tertentu, keselarasan dengan kebutuhan zaman,

ketersediaan pada saat yang diperlukan, keterandalan dalam berbagai kondisi, dan daya tarik yang tinggi.

Dalam perspektif yang lain disebutkan bahwa mutu program PSH biasanya dikaitkan dengan konsep efisiensi (*efficiency*), efektivitas (*effectiveness*), produktivitas (*productivity*), dan kepuasan (*satisfaction*). Efisiensi biasanya berhubungan dengan waktu dan sumber daya. Dalam pengertian bahwa sedikit mungkin waktu dan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh *output* yang maksimal. Efektivitas berarti bahwa bagaimana suatu aktivitas atau program dilakukan sebaik-baiknya sehingga memperlihatkan adanya *outcome* yang dicapai. Produktivitas bermakna optimalisasi, artinya bahwa semua anggota atau komponen suatu organisasi dituntut menghasilkan sesuatu sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Kepuasan lebih berdimensi pada sejauhmana pengguna (*user*) memperoleh kepuasan terhadap layanan pendidikan yang ditawarkan.

Komisi Eropa yang merupakan perwakilan dari 35 negara Eropa, telah mengadakan pengkajian tahun 2002 mengenai indikator mutu PSH (European Commission. Directorate General for Education and Culture, 2002:7-8). Indikator-indikator tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam pendidikan sepanjang hayat, yaitu: (1) *to describe the present situation*, (2) *to quantify the objectives which have been set*, (3) *to provide continuous updates on progress towards certain objectives or*, (4) *to provide insights into which factors might have contributed to achieving results*.

Laporan komisi tersebut menyatakan adanya 15 indikator mutu PSH yang dapat dikelompokkan dalam empat kategori. Kategori dan indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Area A: Skills, Competencies and Attitudes

1. *Literacy*
2. *Numeracy*
3. *New Skills in the Learning Society*
4. *Learning-to-Learn Skills*

5. Active Citizenship Cultural and Social Skills

Area B: Access and Participation

6. *Access to Lifelong Learning*
7. *Participation in Lifelong Learning*

Area C: Resources for Lifelong Learning

8. *Investment in Lifelong Learning*
9. *Educators and Training*

10. ICT in Learning

Area D: Strategies and System Development

11. Strategies of Lifelong Learning

12. Coherence of Supply

13. Counselling and Guidance

14. Accreditation and Certification

15. Quality Assurance

Pendekatan PSH tersebut merupakan strategi kebijakan untuk pembangunan kewarganegaraan, kohesi sosial, ketenagakerjaan, dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa mutu program PSH seyogianya didasarkan pada indikator sebagai berikut.

1. Berkembangnya kemitraan antara semua faktor, baik yang ada dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan nonformal agar bekerja sama dalam melaksanakan program di lapangan.
2. Kegiatan difokuskan pada kebutuhan peserta belajar dan peserta belajar potensial, sejalan dengan kebutuhan pribadi, lembaga, masyarakat, dan pasar kerja.
3. Adanya jaminan ketersediaan sumber belajar disertai pembiayaan yang memadai.
4. Tersedianya akses untuk belajar apa saja, dari siapa saja, di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kaidah moral dan hukum yang ada.
5. Adanya penghargaan yang berimbang kepada hasil pendidikan formal, informal dan nonformal.
6. Terciptanya budaya belajar pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.
7. Adanya mekanisme penjaminan mutu melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang disepakati bersama mengenai indikator mutu program PSH. Adapun indikator mutu program PSH adalah sebagai berikut.

1. Terumuskannya indikator mutu program PSH yang dapat berlaku lintas jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

2. Diperolehnya kesepakatan mengenai indikator mutu program PSH berdasarkan hasil kajian lapangan dan konseptual oleh para wakil pemangku kepentingan.
3. Terhimpunnya bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan standar mutu program PSH.

Tujuan khusus tersebut direncanakan untuk dapat dicapai secara bertahap. Hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa konsep PSH masih belum

banyak dipahami dan juga belum ada penjabaran resmi tentang apa itu gagasan dan atribut yang terkandung dalam PSH. Oleh karena itu maka langkah pengkajian akan dimulai dari pemahaman yang telah dikenal, yaitu pendidikan masyarakat.

Metode Penelitian

Pengkajian ini merupakan pengkajian kebijakan yang bersifat eksploratif (*explorative study*), yaitu menjelajahi kemungkinan penjabaran kebijakan yang bersifat umum sehingga dapat diketahui gagasan dan atribut pokok dari kebijakan tersebut secara lebih operasional. Pengkajian menggunakan metode teramu (*mixed method approaches*), yaitu yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell (2008:552) metode teramu adalah prosedur dalam koleksi, analisis, dan meramu kuantitatif serta kualitatif data dalam satu penelitian tunggal, untuk dapat memahami masalah penelitian. Selanjutnya Creswell (2008:558-561) mengidentifikasi empat macam desain metode teramu yang biasanya dilakukan, yaitu desain triangulasi, desain terjalin (*embedded design*), desain eksplanatoris, dan desain eksploratoris. Desain eksploratoris diawali dengan mengumpulkan data kualitatif, kemudian informasi kuantitatif untuk menjelaskan saling hubungannya.

Berdasarkan pendapat Creswell tersebut maka awal pengkajian ini dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif berupa dokumen kebijakan serta berbagai laporan penyelenggaraan yang berkaitan dengan objek yang dikaji, yaitu program PSH. Kecuali itu juga dikumpulkan informasi dari bahan pustaka dan referensi yang berkaitan. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kebijakan beserta program PSH baru dipahami sebagai pendidikan masyarakat. Berdasarkan kajian konseptual program PSH mempunyai cakupan yang luas, bahkan lintas jalur, jenis, dan jenjang diputuskan untuk menggunakan pendekatan bola salju (*snowball approach*). Menurut Creswell (2008:155) pendekatan ini memperluas cakupan, baik sumber data maupun informasi yang dapat diperoleh.

Berdasarkan pendekatan bola salju tersebut maka instrumen awal kajian yang dikembangkan adalah kuesioner yang berkaitan dengan program pendidikan masyarakat. Kuesioner meliputi 125 indikator mutu yang dikelompokkan dalam sepuluh kategori, yaitu pengelola, pamong belajar atau tutor fasilitator, program belajar, sarana dan prasarana, hasil belajar, warga belajar, raga belajar, kelompok belajar, panti belajar, serta dana belajar. Tiap indikator dimungkinkan pemberian skor dengan rentangan 0 s/d 5. Skor 0 menunjukkan tidak adanya pendapat atas indikator tersebut; skor 1 menunjukkan tidak pentingnya indikator; dan skor 5 menunjukkan sangat pentingnya indikator yang bersangkutan.

Data yang diperoleh melalui kuesioner dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Hasil kajian lapangan tersebut kemudian digabungkan dan dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif dan kemudian disajikan dalam FGD yang diselenggarakan secara berturut-turut dalam tiga lokasi agar dapat terkumpul informasi lebih banyak lagi. Dalam FGD tersebut partisipasi responden diperluas sehingga meliputi para pemangku kepentingan dalam program PSH seperti yang diidentifikasi dalam analisis konseptual dan analisis lapangan yang telah berkembang.

Selanjutnya, hasil FGD diolah dan kemudian disajikan dalam forum yang lebih luas dalam seminar nasional yang diselenggarakan dalam waktu dua hari. Seminar nasional dirancang agar memperluas cakupan pengertian program PSH, serta sekaligus memperoleh rambu-rambu untuk penjabaran kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu program PSH.

Mereka yang dijadikan responden dalam pengkajian dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu Birokrasi atau Pejabat Dinas Pendidikan c.q Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Akademisi atau Dosen PLS atau PSH, Pengelola dan Praktisi PLS atau PSH, dan tokoh masyarakat yang peduli PLS atau PSH. Responden dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan jumlah yang seimbang antara berbagai kategori responden tersebut.

HASIL PENELITIAN

Hasil Kajian Kuantitatif

Hasil kuesioner yang terkumpul dari 168 responden di 21 provinsi hanya dapat diolah sebanyak 145 buah atau 86%. Ada sejumlah kuesioner yang tidak diolah karena tidak semua data yang diminta diberikan (beberapa butir kuesioner kosong), dan ada kuesioner yang diragukan kesungguhan pengisiannya karena semua butir pernyataan (125 buah) direspon dengan skor yang sama.

Hasil pengolahan data kuesioner tersebut menunjukkan bahwa lima indikator yang dianggap paling urgen dalam penyelenggaraan program pendidikan secara berurutan adalah sebagai berikut.

1. Dimilikinya dokumen identitas warga belajar (Kategori Kelompok Belajar #109).
2. Warga belajar memiliki kemampuan baca tulis fungsional (Kategori Warga Belajar indikator #81).

3. Dimilikinya Identitas lembaga (Kategori Kelompok Belajar Indikator #110).
4. Pertanggungjawaban dana (Kategori Dana Belajar Indikator #120).
5. Pamong belajar menjadi motivator agar warga aktif belajar (Kategori Pamong Belajar Indikator #19).

Adapun lima indikator yang dianggap paling tidak urgen adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan sarana yang menjamin kenyamanan dan kesehatan (Kategori Sarana-Prasarana Indikator #89).
2. Pamong belajar menguasai pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Kategori Pamong Belajar Indikator #18).
3. Termanfaatkannya media belajar berbasis TIK (Kategori Sarana-Prasarana Indikator #70).
4. Tersedianya peralatan pendukung pembelajaran dengan TIK (Kategori Sarana-Prasarana Indikator #71).
5. Tersedianya laboratorium dan ruang kreatif (Kategori Sarana-Prasarana Indikator #72).

Hasil Kajian Kualitatif

Hasil kajian kualitatif ini merupakan penggabungan dari data yang diperoleh melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dan FGD. Penggabungan ini dilakukan karena pertama, data saling melengkapi, apa yang dilihat melalui observasi dan didengar penjelasannya melalui wawancara serta hasil pengecekan mengenai rancangan dan laporan kegiatan yang bersangkutan melalui analisis dokumen, merupakan satu kesatuan sehingga tidak mungkin dipisahkan; kedua, banyak kegiatan yang dilaporkan seperti yang dianalisis dari dokumen serta didukung oleh hasil wawancara, tidak dapat dilihat atau diobservasi karena berbagai kendala seperti kegiatan tersebut tidak dilaksanakan setiap hari dan pada hari kunjungan tidak berlangsung kegiatan, kegiatan tersebut berlangsung di tempat jauh misalnya di empang di mana keterampilan perikanan dilaksanakan; serta ketiga, data kualitatif hasil observasi, analisis dokumen, wawancara, dan FGD berfungsi utama untuk mengklarifikasi dan menambah data yang diperoleh melalui kuesioner.

Hasil analisis menunjukkan perlunya sejumlah ketentuan maupun kegiatan yang perlu dikembangkan sebagai berikut.

Pertama, Pemerintah Pusat, Kabupaten atau Kota semestinya membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang pemahaman PSH sebagai suatu kesatuan yang memungkinkan setiap aparat dan setiap komponen dalam masyarakat berkemampuan dalam menyampaikan dan mensosialisasikan program

pendidikan sepanjang hayat kepada khalayak yang lebih luas. Kedua, rumusan indikator PSH sebaiknya dikemas secara sederhana untuk dapat dipahami dengan mudah oleh praktisi PSH.

Ketiga, perlu ada contoh *Good Practice* dari lembaga PLS yang melaksanakan atau menerapkan prinsip-prinsip PSH yang bersifat lintas jalur, jenis, dan jenjang. Keempat, lembaga atau satuan penyelenggara program PSH, terutama pada jalur pendidikan nonformal harus dibina, diawasi, dihidupi, dan dibiayai tidak hanya dalam dimensi program, namun juga dari segi fasilitas, tempat, serta sarana dan prasarana.

Kelima, bila indikator mutu diimplementasikan perlu dipikirkan mengenai institusi independen yang memberikan penjaminan mutu. Keenam, keterkaitan program PSH dengan lembaga lain (kemitraan) mutlak diperlukan. Oleh karena dalam operasionalisasinya kemitraan dengan lembaga lain akan meningkatkan keberdayaan warga belajar dan lembaga penyelenggara PSH. Kemitraan dilakukan dalam bentuk: (a) rekayasa pelebagaan ekonomi masyarakat dengan mengadaptasi budaya setempat di mana kegiatan usaha tersebut bermuara; (b) kemitraan usaha harus berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling menghidupi; serta (c) dilakukan upaya transformasi kelembagaan (kelompok bina) menjadi kelompok atau lembaga yang mandiri melalui proses yang wajar, demokratis, dan sesuai dengan tahap kematangan kegiatan usaha yang diterapkan.

Ketujuh, kegiatan pembelajaran yang menjadi indikator adalah pembelajaran kelompok sedangkan pada saat ini telah mulai berkembang pembelajaran mandiri dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, perlu dikembangkan indikator model pembelajaran yang memberi kemungkinan warga belajar untuk mengembangkan pembelajaran mandiri.

Kedelapan, perlu dikembangkan indikator *input* bagi warga belajar di mana warga belajar menyadari dirinya sebagai *life-long-learner*: (1) sadar bahwa dirinya harus selalu belajar, (2) memandang bahwa mempelajari sesuatu yang baru adalah cara yang baik untuk mengatasi masalah, (3) menyambut baik setiap perubahan, (4) memandang tantangan sebagai pemberian kesempatan untuk belajar hal baru, serta (5) bermotivasi tinggi untuk mempelajari dan melaksanakan sesuatu pada semua tingkatan.

Kesembilan, indikator *output* perlu dikembangkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan nonformal. Di mana lulusan pendidikan nonformal diupayakan untuk dapat berfungsi tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi masyarakat. Agar mereka mampu produktif sehingga

secara terus menerus dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, termasuk pengembangan sosial ekonominya.

Kesepuluh, rendahnya akses warga masyarakat untuk memperoleh buku merupakan hambatan dalam peningkatan mutu PSH maka perlu diupayakan pusat-pusat bacaan masyarakat yang mendorong masyarakat untuk gemar membaca yang diharapkan mampu mencapai *learning society*.

Hasil Seminar Nasional

Seminar merumuskan asas yang perlu dijadikan pegangan dalam mengembangkan program PSH, yaitu kebutuhan warga belajar, terciptanya budaya belajar, relevansi dengan kondisi masyarakat yang sedang membangun, dan berwawasan pada masa depan.

Materi inti program PSH perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu (1) terkait dengan kondisi masa lalu, kondisi saat ini dan kebutuhan di masa datang sesuai dengan umur, kemampuan, potensi lingkungan dan kebutuhan, serta peserta didik dan masyarakat; (2) bersifat holistik dan komprehensif serta memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, dan aktualisasi diri; (3) memberdayakan peserta didik agar mampu mengembangkan diri dan menghadapi tantangan; (4) mengembangkan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional sehingga dapat mewujudkan insan Indonesia yang kooperatif, demokratis, berbudaya, dan kompetitif; serta (5) mampu mengembangkan lima kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Pengembangan materi belajar pada program PSH dilakukan dengan cara berikut. Pertama, dipilih dan ditentukan sendiri oleh warga belajar atau peserta didik dengan mengacu pada pemcah dan atau rambu-rambu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang terutama adalah yang berbasis masyarakat, termasuk keluarga, lingkungan kerja serta dunia usaha dan industri, sepanjang tidak menyimpang dari peraturan perundangan.

Kedua, dikembangkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta lembaga penyelenggara pendidikan yang mempunyai kepedulian, baik lembaga pendidikan formal, nonformal maupun informal. Ketiga, bekerja sama dengan satuan yang relevan dalam mengembangkan materi belajar PSH, termasuk misalnya dunia usaha dan industri. Keempat, melibatkan perguruan tinggi, para profesional dan para pakar pendidikan nonformal. Kelima, melakukan kolaborasi antarinstansi pemerintah, instansi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha atau industri.

Proses penyelenggaraan program PSH hendaknya menekankan pada terjadinya interaksi dan kolaborasi antara sesama warga belajar atau peserta didik, warga belajar atau peserta didik dengan nara sumber termasuk tenaga kependidikan, warga belajar atau peserta didik dengan beragam sumber belajar buatan terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, serta interaksi dengan lingkungan alam dan sosial. Interaksi dan kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperoleh kesamaan dan atau keselarasan tujuan, dan memerlukan partisipasi aktif warga belajar atau peserta didik dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar. Partisipasi tersebut perlu dihargai dan bahkan dibina dan mendapat pengakuan.

Proses penyelenggaraan program PSH disarankan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaannya program PSH memerlukan sumber belajar yang lengkap, minimal tersedia bahan belajar berupa media cetak dan perpustakaan, baik yang tradisional maupun perpustakaan virtual.
2. Proses pembelajaran menjadi optimal jika diawali oleh motivasi, pengetahuan, dan pengalaman belajar dari warga belajar atau peserta didik sendiri, namun memerlukan dukungan lingkungan terdekatnya.
3. Tersedianya narasumber (pendidik, tenaga kependidikan dan atau tokoh masyarakat) setempat yang dapat membantu memberikan informasi dan bersedia berinteraksi dengan memberikan panduan kepada warga belajar atau peserta didik berdasarkan perancah yang ada.
4. Sarana dan fasilitas yang harus tersedia dan dikelola dengan baik.
5. Program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan berdasar pada perancah yang diperlukan.
6. Adanya tempat atau sarana untuk saling berinteraksi, termasuk untuk belajar atau ruang pertemuan.
7. Keanekaragaman sumber belajar dan kemudahan terhadap akses sumber-sumber belajar.
8. Adanya tenaga kependidikan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terampil dalam teknologi pembelajaran.
9. Adanya kolaborasi antarpihak yang berkepentingan untuk menyepakati bersama program beserta kompetensi yang disyaratkan dalam mengikuti program pendidikan tersebut. Program tersebut harus merepresentasikan kebutuhan belajar dan sesuai dengan perkembangan zaman.
10. Penggunaan metode dan teknik belajar dan pembelajaran yang bervariasi.

11. Inti pembelajaran adalah terjadinya transformasi dalam diri warga belajar atau peserta didik dengan mengacu pada pola pemenuhan kebutuhan seketika.
12. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu digalakkan, dengan terlebih dahulu mengenalkan faedah, manfaat, dan melatih keterampilan dalam penggunaannya.
13. Proses pembelajaran dilakukan secara bervariasi melalui belajar mandiri, belajar dengan tatap muka; belajar melalui magang; belajar secara berkelompok, belajar jarak jauh, dan belajar berjaringan (*online learning*).
14. Proses harus disesuaikan dengan latar belakang atau karakteristik warga belajar atau peserta didik serta jenis program yang dipelajari dan kondisi lingkungan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan interpretasi atas data yang berkembang, yang diperoleh dengan teknik bola salju (*snowballing technique*). Data awal berupa data kuantitatif yang terbatas pada bidang pendidikan masyarakat dan dijarah dengan kuesioner, berkembang ke arah pendidikan nonformal dengan dikumpulkannya data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, berkembang lagi ke arah pendidikan informal dan nonformal melalui tiga kali FGD, dan akhirnya berkembang ke arah konsep dan strategi PSH sebagai hasil seminar nasional. Meskipun demikian perlu diakui bahwa pengkajian ini kurang berhasil merumuskan indikator mutu program PSH karena persepsi para pemangku kebijakan di daerah maupun di pusat masih belum padu dalam pendapat dan pemikiran.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa di lapangan konsep dan strategi PSH belum dikenal. Para praktisi, birokrat, dan bahkan akademisi yang ada di lapangan terkungkung dengan apa yang selama ini dikerjakan berdasarkan kebiasaan dan struktur kegiatan yang dianggap telah mapan. Dengan kata lain cenderung untuk melestarikan apa yang telah diketahui dan dilakukan selama ini.

Masih banyak pejabat dan akademisi pendidikan (apalagi praktisi dan orang awam) yang menafsirkan PSH sekedar sebagai jangka waktu kehidupan mulai dalam kandungan hingga ke liang lahat. Padahal telah terjadi perubahan paradigma dalam belajar yang disebabkan antara lain karena perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi, penetrasi media massa terutama televisi, perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi, dan perubahan lingkungan sosial dan alam. Perubahan paradigma tersebut berimplikasi pada berkembangnya PSH sebagai konsep dan strategi yang perlu ditumbuh kembangkan.

Berbagai perubahan tersebut sebenarnya telah terakomodasikan dalam peraturan perundangan, yaitu UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang antara lain

mencantumkan bahwa pendidikan berusaha mengembangkan potensi peserta didik, dan diselenggarakan dengan sistem terbuka serta multimakna. Ketentuan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut, termasuk kaitan antara pendidikan informal, formal, nonformal dan pendidikan di tempat kerja yang bersifat formal (terstruktur dan berjenjang) dengan pendekatan informal (melalui pengamatan, peniruan dan internalisasi), dan nonformal yang menekankan pada penguasaan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional.

Penafsiran yang berkembang berdasarkan perkembangan data dapat disimpulkan dalam butir-butir sebagai berikut.

1. Pembenahan administratif pengembangan program PSH perlu mendapat perhatian. Ada kekhawatiran program PSH yang tidak dikelola dengan baik merupakan jalan pintas untuk memperoleh tanda penghargaan (ijazah, diploma, dan sertifikat), dan bukannya untuk kemampuan fungsional.
2. Keberadaan dan penggunaan sumber belajar termasuk teknologi yang dianggap tidak penting merupakan tantangan tersendiri. Cukup indikasi bahwa responden di daerah masih belum memahami arti penting teknologi bagi kemajuan pembangunan.
3. Indikator mutu PSH yang dikembangkan dari patokan pendidikan masyarakat tidak cukup merepresentasikan indikator mutu program PSH yang diharapkan karena masih sangat terbatas cakupan dan indikatornya, bahkan cenderung konservatif dan ketinggalan zaman. Konsep dan strategi pengembangan pendidikan, termasuk PSH belum sesuai dengan nafas otonomi daerah dan filosofi PLS yang secara faktual empirik memiliki keragaman satuan, program, dan sasaran.
4. Indikator mutu yang dikembangkan melalui FGD yang diselenggarakan untuk mengolah masukan dari lapangan dan kajian pustaka telah memperluas cakupan program PSH, namun belum cukup komprehensif serta merepresentasikan dan

- mengakomodasi keragaman satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program PSH. Oleh karena itu, untuk keperluan pengembangannya perlu dijabarkan rambu-rambu atau struktur bangunan pengetahuan (*knowledge scaffold*) yang dapat dijabarkan lebih spesifik dan implementatif.
5. Seminar nasional yang diselenggarakan untuk menambah, memperbaiki, dan memantapkan hasil-hasil kajian yang telah dilakukan, baik kajian lapangan maupun kajian konseptual melalui analisis pustaka telah berhasil mengembangkan rambu-rambu yang merupakan bahan masukan untuk kebijakan dalam rangka pengembangan program PSH yang bermutu.
 6. Indikator mutu masukan (*input*) bagi warga belajar adalah menyadari dirinya sebagai pemelajar seumur hidup (*lifelong-learner*), yaitu: (a) sadar bahwa dirinya harus selalu belajar, (b) memandang bahwa mempelajari sesuatu yang baru adalah cara yang baik untuk mengatasi masalah, (c) menyambut baik setiap perubahan, (d) memandang tantangan sebagai pemberian kesempatan untuk belajar hal baru, (e) bermotivasi tinggi untuk mempelajari dan melaksanakan sesuatu pada semua tingkatan.
 7. Indikator proses PSH merupakan proses yang terbuka, yaitu siapa saja, di mana saja, kapan saja, dapat belajar apa saja, dari apa dan siapa saja, dengan cara bagaimana saja sepanjang mengikuti kaidah moral, etika, sosial, dan konstitusional. Ketentuan perundangan yang ada mengenai proses pendidikan baru meliputi jalur pendidikan formal (PP No. 19 Tahun 2005).
 8. Indikator mutu keluaran (*output*) dalam pengelolaan satuan atau lembaga penyelenggara program PSH adalah berkembangnya potensi pribadi yang berfungsi tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi masyarakat agar mereka mampu produktif sehingga semakin terjadi peningkatan didalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Terbentuknya identitas dan kepuasan diri merupakan indikator utama dari keluaran, dengan pengakuan dan atau penghargaan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Sementara itu, untuk keperluan mobilitas pemerintah dapat menetapkan prinsip dan prosedur penghargaan atau pengakuan yang bersifat otentik. Penghargaan atau pengakuan tersebut dapat berupa ijazah, diploma, sertifikat atau bentuk tertulis lain.
 9. Akses warga masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan berbagai macam sumber belajar, termasuk buku, nara sumber, lingkungan, dan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu indikator penting peningkatan mutu program PSH. Ketersediaan taman bacaan atau pusat-pusat bacaan masyarakat dapat berfungsi untuk mendorong masyarakat gemar membaca dan belajar yang merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat berpengetahuan.
 10. Materi inti program pendidikan sepanjang hayat perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: (a) adanya keterkaitan dengan kondisi masa lalu, kondisi saat ini, kebutuhan di masa datang sesuai dengan umur, kemampuan, potensi lingkungan, dan kebutuhan peserta didik, serta masyarakat; (b) bersifat holistik dan komprehensif serta memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, dan aktualisasi diri; (c) memberdayakan peserta didik agar mampu mengembangkan diri dan menghadapi tantangan; (d) mengembangkan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional sehingga dapat mewujudkan insan Indonesia yang kooperatif, demokratis, berbudaya, dan kompetitif; serta (e) mampu mengembangkan lima kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.
 11. Kegiatan pembelajaran yang menjadi indikator mutu program PSH tidak hanya belajar berkelompok tetapi juga belajar mandiri dengan menekankan selalu adanya interaksi. Interaksi tersebut berlangsung antara sesama warga belajar atau peserta didik, warga belajar atau peserta didik dengan guru atau pamong belajar, warga belajar atau peserta didik dengan lingkungan, dan warga belajar atau peserta didik dengan materi pelajaran yang memungkinkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, perlu dikembangkan proses penyelenggaraan program belajar dilakukan dengan menggunakan pola yang bervariasi, yaitu (a) belajar mandiri, (b) belajar dengan tatap muka, (c) belajar melalui magang, (d) belajar secara berkelompok, dan (e) belajar beregu (*team learning*).
 12. Pelembagaan program PSH dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek (a) sikap dan tindakan, (b) kegemaran menjadi kebiasaan, (c) jenis kelembagaan, (d) karakteristik program, (e) dukungan sistem regulasi, (f) kebijakan (*policy*), dan (g) manajemen profesional.

Implikasi

Implikasi dari hasil kajian indikator mutu program PSH bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut.

1. Indikator mutu program PSH tentunya harus berkaitan dengan UU dan Peraturan Pemerintah yang mengarahkan pada standar mutu pendidikan dan Standar Nasional

Pendidikan menjadi tanggung jawab BSNP. Hasil kajian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam konteks melengkapi UU dan Peraturan-peraturan yang ada sekaligus dapat dijadikan bahan kebijakan di bidang pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan mutu program pendidikan sepanjang hayat.

2. Bagi tingkat satuan pendidikan penyelenggara program PSH, hasil kajian indikator mutu ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kurikulum atau program pembelajaran yang komprehensif.
3. Bagi praktisi atau pengelola satuan pendidikan penyelenggara program PSH, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan program PSH yang dilangsungkan di sekolah, masyarakat, dan keluarga.
4. Bagi forum-forum PSH, orang tua, dan masyarakat hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai mutu tingkat satuan pendidikan sepanjang hayat yang berada di wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum, khususnya mutu PSH.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Asas dan prinsip yang dihasilkan dalam kajian ini dijadikan semacam perancah (*scaffold*) sebagai acuan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian dan pengembangan kelembagaan (*institutional research and development*).
2. Fokus pengembangan program PSH harus ditempatkan pada kebutuhan belajar dan pendidikan warga belajar atau peserta didik yang terus tumbuh dan berkembang dengan menumbuhkan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arah diri (*self-directed learning*). Untuk itu, perlu dijamin akses untuk belajar dan ketersediaan sumber belajar yang diperlukan.
3. Materi yang perlu dipelajari bersifat holistik dan komprehensif namun fungsional untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta sedikitnya meliputi pengembangan aspek kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetik serasi dengan pemenuhan diri, serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, rumusannya harus dikemas secara sederhana agar dapat dipahami dengan mudah oleh praktisi PSH.
4. Proses belajar dan pembelajaran menekankan pada terjadinya interaksi dan kolaborasi antara sesama warga belajar atau peserta didik, warga belajar atau peserta didik dengan nara sumber termasuk tenaga kependidikan,

warga belajar atau peserta didik dengan beragam sumber belajar buatan terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, serta interaksi dengan lingkungan alam dan sosial. Interaksi dan kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperoleh kesamaan dan atau keselarasan tujuan serta memerlukan partisipasi aktif warga belajar atau peserta didik dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar. Partisipasi tersebut perlu dihargai dan bahkan dibina dan mendapat pengakuan.

5. Perlunya pelembagaan kegiatan PSH, meliputi pelembagaan sikap dan tindakan, pelembagaan satuan pendidikan yang berbasis kemitraan, pelembagaan program, pelembagaan kebijakan termasuk manajemen, regulasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Temuan dalam kajian ini mengandung implikasi bahwa meskipun dalam UU Sisdiknas, program PSH tidak tercantum secara eksplisit sebagai suatu konsep dan atau sistem, namun secara konseptual dan empirik keberadaannya tidak diragukan lagi. Atribut atau ciri yang melekat pada konsep dan atau sistem PSH harus berkaitan dengan perundangan yang ada, dan mutunya perlu memenuhi ketentuan standar yang diharapkan dapat dikembangkan ke dalam Standar Nasional PSH.

Kajian ini merupakan langkah awal yang bersifat eksploratorik untuk mengidentifikasi gagasan serta atribut yang melekat pada program PSH sebagai suatu konsep dan sistem dalam menuju tercapainya masyarakat berpengetahuan. Langkah awal ini dengan sendirinya memerlukan tindak lanjut. Oleh karena itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan organisasi kunci dalam mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, di antara mereka harus terjalin kemitraan dalam penyelenggaraan program PSH.
2. Program PSH harus mengedepankan pengembangan potensi manusia (*development of human potential*). Oleh sebab itu, pengembangan program PSH perlu berfokus kepada warga belajar atau peserta didik dengan memperhatikan karakteristik mereka, kompetensi yang diharapkan, serta kondisi lingkungan.
3. Dilakukan usaha lebih lanjut termasuk pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi, penggunaan teknologi, pengintegrasian penyelenggaraan, diterbitkannya regulasi, dijabarkannya perancah yang mengandung indikator mutu, pembinaan, pengembangan percontohan, serta penyediaan dan akses terhadap sumber belajar.
4. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut berupa penelitian dan pengembangan kelembagaan (*institutional research and development*) yang menggunakan temuan kajian ini sebagai rujukan awal dengan memperhatikan

- tantangan global dalam menuju masyarakat berpengetahuan.
5. Program belajar sepanjang hayat pada semua jalur pendidikan harus mempertimbangkan pengembangan sistem akreditasi (*accreditation*), penggunaan teknologi (*technology issues*), terintegrasi dalam penyelenggaraannya (*integration*), memperhatikan mutu (*quality*), dan didukung oleh pembiayaan yang memadai (*finance*).
 6. Diusahakan terbit suatu regulasi yang nantinya efektif sebagai pedoman para penyelenggara, praktisi, dan penggiat program PSH.
 7. Bila indikator mutu diimplementasikan perlu dipikirkan dan dikembangkan mengenai lembaga atau institusi independen yang memberikan penjaminan mutu PSH.
 8. Lembaga atau satuan PSH, terutama pada jalur pendidikan nonformal harus dibina, diawasi, dihidupi, dan dibiayai tidak hanya dalam dimensi program, namun juga dari segi sarana, dan prasarana.
 9. Diperlukan contoh *lifelong learning facilitating curriculum* atau kurikulum yang mempermudah terjadinya belajar sepanjang hayat dalam berbagai satuan dan jenjang PSH.
 10. Perlunya menghidupkan forum-forum pengelola PSH yang berfungsi sebagai sarana tukar pendapat dan *sharing* pengalaman.
 11. Tersedianya Perpustakaan Mini, Perpustakaan Komunitas, Taman Bacaan Masyarakat atau apapun namanya di setiap RW bahkan kalau memungkinkan sampai tingkat RT. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong masyarakat ke arah masyarakat gemar membaca dan gemar belajar yang menjadi cikal bakal terbentuk masyarakat belajar (*learning society*).
 12. Dalam konteks pengembangan pengkajian dan penelitian maka perlu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan berupa observasi langsung dan uji coba di lapangan untuk memastikan sejauhmana indikator-indikator yang disepakati dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan mutu pendidikan.
 13. Keterbatasan jumlah dan kelompok responden yang dipilih dan berpartisipasi di dalam pengkajian ini perlu dikembangkan lebih banyak dan bervariasi untuk mewakili berbagai kelompok berdasarkan letak geografis maupun beragam kelompok masyarakat pengguna lulusan satuan PSH termasuk dunia usaha dan dunia industri.
 14. Perlunya komparasi pengkajian jenis lain yang berkaitan dengan indikator mutu PSH, seperti meta analisis, studi banding, dan studi kasus agar didapat hasil yang lebih komprehensif.
 15. Implementasi indikator mutu program PSH, memerlukan adanya contoh *Good Practice* dari lembaga atau satuan penyelenggara program PSH yang melaksanakan atau menerapkan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat.
 16. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu program PSH, Pemerintah Pusat, Kabupaten atau Kota dengan dukungan akademisi setempat diharapkan dapat membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang pemahaman PSH sebagai suatu kesatuan yang memungkinkan setiap aparat dan setiap komponen dalam masyarakat berkemampuan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan program PSH kepada khalayak yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- European Commission. (2002). *European report on quality indicators of lifelong learning*. Brussel: Directorate General for Education and Culture.
- Longworth, N & Davies, W.K. (1996). *Lifelong learning*. London: Kogan Page Limited.
- Miarso, Y. (2004). *Menyemai benih teknologi pendidikan*. Jakarta: Pustekom Diknas & Kencana.
- Morrison, D. M., Mohaski, K. & Cotter, K. (2005). *Instructional quality indicators research foundations*. Cambridge, MA: Conect.
- Sudjana, H.D. (2004). *Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, filsafat, teori pendukung*. Bandung: Falah Production.
- Jenkins, L. (1996). *Improving student learning. Applying deming quality principles in education*. Milwaukee, WI: ASOQ Press, hh. 12-13.
- <http://www.nea.org/schoolquality/index.html>.
- (2002) Keputusan Menteri No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Satuan Pendidikan.
- (2003) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- (2005) Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.